BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urbanisasi telah menjadi fenomena global yang transformatif sehingga mendorong perubahan signifikan dalam struktur demografis dan ekonomi masyarakat selama tiga abad terakhir, khususnya dari tahun 1750 hingga 2050 (Ni, 2023). Pertumbuhan urbanisasi yang cepat diperkirakan akan mencapai 68% pada tahun 2050, terutama di negara-negara berkembang (Byulegenova & Turemuratov, 2023). Transformasi ini didorong oleh interaksi kompleks antara faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi global dan pergeseran demografis, mendorong migrasi dari daerah perdesaan ke perkotaan (Y. Wang dkk., 2016). Faktor internal meliputi pembangunan ekonomi, pengembangan infrastruktur, serta tata kelola dan kebijakan yang mendukung urbanisasi (Miranti, 2019).

Pertumbuhan pesat ini juga menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat, termasuk kebutuhan akan infrastruktur yang memadai, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut (Z. Wang, 2025).

Urbanisasi, yang ditandai dengan konsentrasi penduduk dan aktivitas di wilayah tertentu, juga menciptakan tantangan dalam pengelolaan kawasan perkotaan yang semakin padat sehingga diperlukan pengenalan karakteristik pada kawasan perkotaan (Mardiansjah dkk., 2021). Aspek lainnya seperti, aspek demografis penting untuk dilihat perubahan fisik yang terjadi dalam pola spasial, seperti munculnya pusat pelayanan baru, menjadi bagian integral dari pemahaman terhadap urbanisasi (Hassan & Pitoyo, 2018). Proses urbanisasi menjadi penting dikarenakan urbanisasi di negara-negara berkembang tidak hanya merupakan fenomena yang menarik, tetapi juga merupakan tantangan global yang kompleks dalam pengelolaannya yang dibutuhkan berbagai cara dan respon baru yang inovatif (United Nations, 2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, sebanyak 56,7% penduduk yang ada di Indonesia tinggal pada wilayah perkotaan. Persentase penduduk yang tinggal di wilayah

perkotaan terus meningkat hingga 2035 sebesar 66,5%. BPS pada tahun 2015 telah mengadakan Survei Penduduk Antar-Sensus dengan menghasilkan terkonsentrasinya penduduk yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa sebesar 56,8% atau 146,8 juta penduduk dari 255,2 juta penduduk. Perkembangan kawasan perkotaan yang ada di Pulau Jawa sangat pesat terutama setelah abad ke–20. Hal ini menggambarkan Pulau Jawa menjadi sebuah wilayah yang cepat akan pertumbuhan penduduk dan kawasan perkotaan.

Jawa menjadi tempat berkembangnya kota-kota utama di Indonesia, sehingga Jawa menjadi kawasan dari sebagian besar dari kota-kota terbesar Indonesia (Mardiansjah & Rahayu, 2020). Demikian, terdapat suatu hal yang menarik pada perkembangan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Proses dan pembentukan formasi perkotaan yang melebar ini tidak lagi hanya terjadi pada kota-kota yang berukuran besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung saja, tetapi juga telah terjadi pada beberapa kawasan perkotaan lain, termasuk yang berbasiskan pada kota-kota yang jauh lebih kecil (Mardiansjah & Rahayu, 2019). Urbanisasi yang terjadi terdapat hal yang membedakan antara konsentrasi pertumbuhan di kawasan-kawasan perkotaan dilihat dari skala/ukuran dan laju pertumbuhan tidak hanya dari aspek kependudukan dan fisik spasial. Besar pengaruh dari perbedaan peran dan fungsi kota (Sukmawati & Utomo, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat dua bentuk dan pengklasifikasian dalam mendefinisikan kota yaitu kota administrasi dengan status kota resmi sebagai daerah otonom serta kota fungsional (kawasan perkotaan) yang ditentukan berdasarkan kriteria dari klasifikasi yang sudah ditentukan dari jumlah penduduk dan dominasi fungsi kegiatan ekonomi atau berdasarkan fungsi dan peran perkotaan. Pertumbuhan sebuah perkotaan tidak hanya terkonsentrasi terjadi di daerah kota besar seperti, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya (Mardiansjah dkk., 2019). Pertumbuhan perkotaan juga terjadi di perkotaan sedang hingga perkotaan kecil. Tumbuhnya perkotaan besar memunculkan adanya perkotaan-perkotaan lain yang dapat membentuk simpul. Adanya kawasan perkotaan yang terencana dapat memunculkan rencana lainnya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 disebutkan bahwasanya Kabupaten Purworejo salah satu Wilayah Pengembangan (WP) Keburejo yang meliputi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman akan pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo. Pemahaman ini diperlukan untuk pengembangan perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah,

termasuk urbanisasi karena kawasan perkotaan perlu peningkatan dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan perkotaan (Mardiansjah dkk., 2020). Rekomendasi ini ditujukan tidak hanya untuk pejabat di daerah-daerah kota saja tetapi terutama untuk pejabat di daerah-daerah kabupaten yang telah mengalami proses urbanisasi yang cepat.

1.2 Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu perubahan desa-desa non perkotaan menjadi desa perkotaan. Perubahan tersebut terjadi hampir di seluruh kecamatan sehingga setiap kawasan perkotaan kecamatan memiliki pertumbuhan masing-masing. Oleh karena itu, memunculkan suatu pertanyaan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu "Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di setiap kecamatan sehingga dapat memahami dinamika, karakteristik dan tipologi kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo?"

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan kawasan perkotaan yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Purworejo secara *time series*. Hasil analisis perkembangan kawasan perkotaan tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan tata ruang. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi perkembangan desa-desa perkotaan dari Kawasan Perkotaan Kecamatan untuk mengidentifikasi pertumbuhan kawasan perkotaan pada setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo.
2. Mengidentifikasi dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan-kawasan perkotaan tersebut berdasarkan aspek administratif, aspek fisik spasial, dan aspek kependudukan.
3. Menganalisis karakteristik pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan setiap kecamatan dari dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan-kawasan perkotaan.
4. Merumuskan tipologi pertumbuhan kawasan perkotaan yang berkembang dari karakteristik pertumbuhan dan perkembangan setiap kawasan perkotaan serta dari dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan yang membentuk tipologi kawasan perkotaan dan tipologi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup membahas mengenai batasan dalam tugas akhir ini. Ruang lingkup berperan sebagai penentu substansi termasuk dalam pembahasan atau kegiatan yang sedang dilakukan. Ruang lingkup membantu memperjelas fokus dan membatasi area yang akan dibahas dan diteliti.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Purworejo salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan. Kabupaten ini terletak pada posisi 109°47’28”–110°8’20” Bujur Timur dan 7°32’–7°54’ Lintang Selatan. Kabupaten Purworejo memiliki 16 kecamatan dan 494 desa/kelurahan. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan batas wilayah didasarkan pada master file wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041. Kabupaten Purworejo berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen
Sebelah Timur : Kabupaten Kulon Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta)

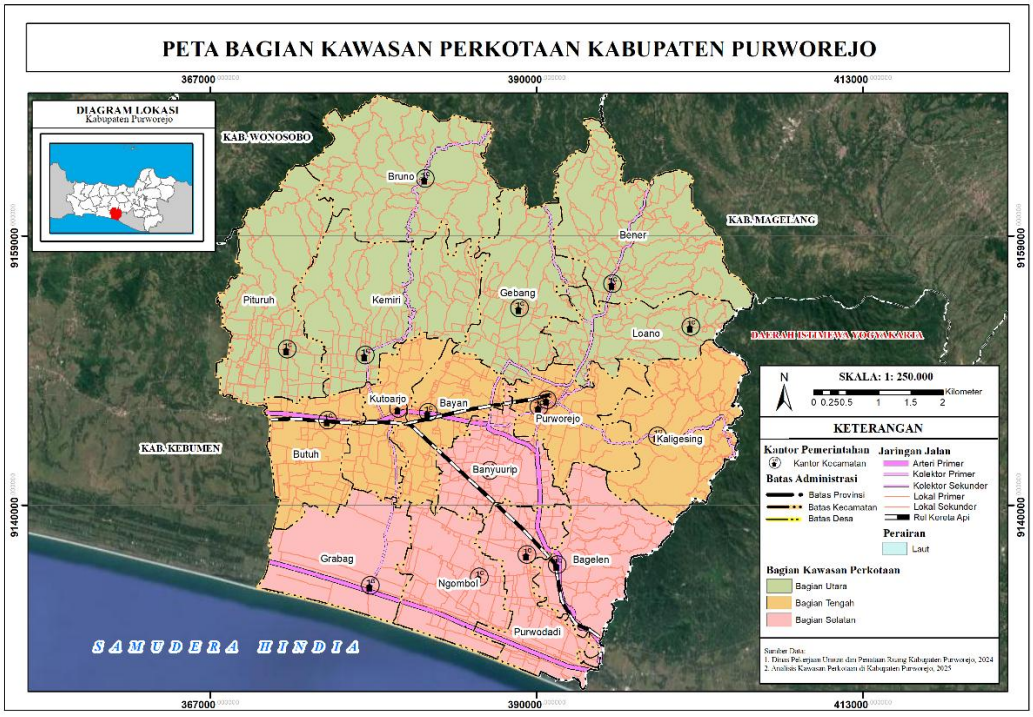

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, 2025

Gambar 1. 1. Peta Bagian Kawasan Perkotaan Kabupaten Purworejo

Wilayah yang dikaji dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian kawasan perkotaan Kabupaten Purworejo yakni Bagian Utara, Bagian Tengah, dan Bagian Selatan. Pembagian ini didasarkan dari jaringan jalan yang melintasi masing-masing bagian kawasan, dilihat dari perbedaan karakteristik infrastruktur transportasi antarbatas wilayah. Fisik alam berupa morfologi wilayah Kabupaten Purworejo serta dilihat dari batas adminsitratif kecamatan. Tujuan pembagian ini untuk mempermudah analisis dinamika, karakteristik, dan tipologi pertumbuhan kawasan perkotaan yang berkembang di Kabupaten Purworejo. Tabel indikator penentuan kecamatan dalam bagian kawasan Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada **Tabel 1.1.**

Tabel 1. 1. Indikator Penentuan Kecamatan dalam Bagian Kawasan Kabupaten

Kecamatan	Indikator			
	Jaringan Transportasi	Morfologi		Keterangan
Bagian Utara				
Pituruh	• Lokal Primer • Lokal Sekunder	59,7 km^2 perbukitan	52,2 % perbukitan	Bagian Utara
Kemiri	• Kolektor Primer • Kolektor Sekunder • Lokal Primer	65,7 km^2 perbukitan	63,7 % perbukitan	Bagian Utara
Bruno	• Kolektor Sekunder • Lokal Primer	104 km^2 perbukitan	98,4 % perbukitan	Bagian Utara
Gebang	• Arteri Primer • Kolektor Sekunder • Lokal Primer • Lokal Sekunder	44,3 km^2 perbukitan	62,9 % perbukitan	Bagian Utara
Loano	• Kolektor Primer • Kolektor Sekunder • Lokal Primer • Lokal Sekunder	44,8 km^2 perbukitan	83,8 % perbukitan	Bagian Utara
Bener	• Kolektor Primer • Lokal Primer • Lokal Sekunder	99,8 km^2 perbukitan	97,5 % perbukitan	Bagian Utara
Bagian Tengah				
Butuh	• Arteri Primer • Lokal Primer • Rel Kereta Api	46,6 km^2 dataran	98,7 % dataran	Bagian Tengah
Kutoarjo	• Arteri Primer • Kolektor Sekunder • Lokal Primer • Lokal Sekunder • Rel Kereta Api	37,5 km^2 dataran	95,8 % dataran	Bagian Tengah
Bayan	• Arteri Primer • Kolektor Primer • Lokal Primer • Rel Kereta Api	44 km^2 dataran	98,7 % dataran	Bagian Tengah
Purworejo	• Kolektor Primer • Kolektor Sekunder • Lokal Primer	44,3 km^2 dataran	83,2 % dataran	Bagian Tengah

Kecamatan	Indikator			
	Jaringan Transportasi	Morfologi		Keterangan
	• Lokal Sekunder • Rel Kereta Api			
Kaligesing	• Kolektor Sekunder • Lokal Primer • Lokal Sekunder	78 km^2 perbukitan	99,6 % perbukitan	Bagian Tengah
Bagian Selatan				
Grabag	• Arteri Primer • Kolektor Sekunder • Lokal Primer • Lokal Sekunder	39,7 km^2 dataran	58,6 % dataran	Bagian Selatan
Ngombol	• Arteri Primer • Lokal Primer • Lokal Sekunder	47,3 km^2 dataran	79,7 % dataran	Bagian Selatan
Purwodadi	• Arteri Primer • Lokal Primer • Lokal Sekunder • Rel Kereta Api	48,4 km^2 dataran	90,4 % perbukitan	Bagian Selatan
Bagelen	• Arteri Primer • Lokal Primer • Lokal Sekunder • Rel Kereta Api	57,4 km^2 perbukitan	90,4 % perbukitan	Bagian Selatan
Banyuurip	• Arteri Primer • Kolektor Primer • Kolektor Sekunder • Lokal Primer • Lokal Sekunder • Rel Kereta Api	47,2 km^2 dataran	98,9 % dataran	Bagian Selatan

Sumber: Penulis, 2025

Bagian Utara terdiri dari 6 (enam) kecamatan meliputi, Kecamatan Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, dan Bener. Bagian Utara memiliki morfologi yang dominan berupa perbukitan dengan topografi lebih berbukit, terlihat dari pola persebaran permukiman dan jaringan jalan yang cenderung lebih jarang dan berkelok mengikuti kontur tanah. Bagian Utara berfungsi sebagai wilayah yang relatif lebih terpencil dengan konektivitas jaringan jalan yang masih terbatas, sehingga pola aktivitasnya berbeda dengan wilayah lainnya.

Bagian Tengah terdiri dari 5 (lima) kecamatan meliputi, Kecamatan Butuh, Kutoarjo, Bayan, Purworejo, dan Kaligesing. Bagian Tengah memiliki morfologi yang dominan berupa dataran, sehingga memudahkan pusat aktivitas dan mobilitas ekonomi yang lebih tinggi, yang dapat dilihat dari konsentrasi jaringan jalan arteri primer dan jalur kereta api yang terfokus di wilayah ini. Kondisi ini juga diperkuat dengan adanya keberadaan kantor pemerintahan seperi kantor bupati dan kantor kecamatan yang lebih rapat, serta konektivitas antar kecamatan yang lebih baik. Kecamatan Kaligesing termasuk dalam Bagian Tengah karena keterhubungannya yang kuat secara aksesibilitas dan infrastruktur dengan pusat

perkotaan, meskipun secara morfologi wilayah berbukit, secara adminsitrasi Kaligesing berbatasan langsung dengan kecamatan lain di Bagian Tengah, sehingga memperjelas orientasi ruang dan perannya dalam sistem perkotaan Kabupaten Purworejo.

Bagian Selatan terdiri dari 5 (lima) kecamatan meliputi, Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, dan Banyuurip. Bagian Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki morfologi berupa dataran pesisir. Pola jalan yang lurus sejajar dengan garis pantai menandakan adanya keterkaitan kuat antar kawasan pesisir dan potensi ekonomi kelautan. Bagian Selatan berperan sebagai wilayah yang mendukung aktivitas kelautan dan agraris, dengan karakteristik jaringan jalan yang menghubungkan kawasan pesisir ke Bagian Tengah. Kecamatan Banyuurip masuk ke dalam Bagian Selatan karena secara jaringan transportasi, Banyuurip terintegrasi dalam koridor jalan utama yang menghubungkan antarkawasan di Bagian Selatan, dari aspek morfologi berada pada dataran renndah dengan ketinggian relatif rendah, selain itu secara administrasi, batas Kecamatan Banyuurip bersinggunagn langsung dengan kecamatan di Bagian Selatan meliputi, Purwodadi dan Ngombol, sehingga memiliki fungsi sebagai penghubung strategis antar sentra aktivitas di Bagian Tengah dan Selatan.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi berisi pembahasan dalam tugas akhir pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Purworejo yang bertujuan untuk membatasi penelitian yang akan dilakukan. Adapun ruang lingkup materi yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Analisis perkembangan desa-desa perkotaan menggunakan data Potensi Desa (PODES) dan data klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan menurut Badan Pusat Statistik untuk mengidentifikasi jumlah desa yang tumbuh dan berkembang menjadi desa perkotaan untuk deliniasi kawasan perkotaan setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo.
2. Biasanya analisis dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan dilakukan menggunakan tiga aspek: fisik kewilayahan, kependudukan, dan ekonomi (Dadashpoor & Etemadi, 2024). Namun, penelitian ini hanya menggunakan aspek fisik kewilayahan dan kependudukan, dimana aspek fisik kewilayahan menggunakan dua aspek yaitu: aspek fisik kewilayahan yang dilihat dari variabel administratif (jumlah desa perkotaan dan luas wilayah kawasan perkotaan), dan variabel fisik spasial (luas lahan terbangun dan persentase lahan terbangun); dan aspek

kependuduk (jumlah penduduk dan kepadatan penduduk) untuk mengetahui perubahan pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo. Aspek ekonomi tidak dipergunakan pada penelitian ini karena tidak terdapatnya data skala mikro di level kecamatan yang tersedia. Data perekonomian yang tersedia pada skala makro (kabupaten/provinsi) yang didasarkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), untuk bukti tidak adanya data skala mikro dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

3. Analisis karakteristik pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan setiap kecamatan menggunakan hasil dari dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan-kawasan perkotaan berdasarkan aspek adminsitratif, aspek fisik spasial, dan aspek kependudukan.
4. Analisis tipologi pertumbuhan kawasan perkotaan yang berkembang berdasarkan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo sehingga menghasilkan tipologi kawasan perkotaan dan tipologi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan guna untuk penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Purworejo.

1.5 Tahapan/Proses

Tahapan atau proses pelaksanaan ini berisi urutan dan penjelasan kegiatan yang dilakukan dalam proses melakukan penelitian. Tahapan tersebut mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis hingga tahap akhir berupa output yang dihasilkan. Tahapan yang dilakukan dalam proses melakukan penelitian terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Purworejo menggunakan beberapa analisis antara lain.

1.5.1 Tahap Persiapan

Tahapan persiapan pada penelitian ini diawali dengan proses mengidentifikasi karakteristik wilayah dengan pengumpulan informasi, data, dan fakta yang mendukung topik penelitian yaitu pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Purworejo. Informasi yang diperoleh dengan cara mengkaji berbagai dokumen, baik yang berupa jurnal penelitian terdahulu, buku, artikel, peraturan pemerintah, telaah dokumen maupun hasil dari website resmi yang dapat dipergunakan untuk merumuskan masalah serta tujuan pada penelitian ini.

1.5.2 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau dari sumber lain yang kredibel. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data yang dipergunakan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Purworejo. Data sekunder yang dikumpulkan, antara lain:

1. Data potensi desa tahun 1990 dan tahun 2000 dan data klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan tahun 2010 dan 2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
2. Data kependudukan berupa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tahun 1990, 2000, 2010, dan 2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
3. Data lahan terbangun kawasan perkotaan dengan didapatkan *GHS Built-up Surface* yang bersumber dari platform penyedia yaitu human-settlement.emergency.copenicus.eu.
4. Data batas wilayah administrasi desa dan batas wilayah administrasi kecamatan yang bersumber dari DPUPR Kabupaten Purworejo.

1.5.3 Tahap Analisis

Tahap analisis merupakan ini dari penelitian, data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara sistematis untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo. Analisis dilakukan dalam empat tahapan yang saling berkaitan yaitu:

1. Analisis perkembangan desa-desa perkotaan diperlukan data potensi desa dengan klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan yang nantinya menghasilkan data jumlah desa perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*) pada setiap periode..
2. Analisis dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan untuk melihat perubahan kawasan perkotaan berdasarkan tiga aspek utama meliputi, aspek administratif, aspek fisik spasial, dan aspek kependudukan secara *time series* pada tahun 1990, 2000, 2010, dan 2020.
    a. Data aspek administrasi menggunakan data batas desa serta data klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan sehingga diketahui deliniasi kawasan perkotaan dan menghasilkan perkembangan jumlah desa perkotaan dan luas wilayah kawasan perkotaan.
    b. Data fisik spasial didapatkan dari pengolahan *GHS built-up surface* yang diolah menggunakan metode GHSL melalui proses reklasifikasi sehingga didapatkan

data yang terbagi menjadi dua kelas yaitu lahan terbangun dan data lahan nonterbangun.

c. Data kependudukan menggunakan data jumlah penduduk perkotaan serta data kepadatan penduduk perkotaan yang diperoleh dari data jumlah penduduk perkotaan dibagi dengan luas wilayah kawasan.

3. Analisis karakteristik pertumbuhan kawasan perkotaan dengan hasil dari pengolahan dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo.
4. Tipologi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan menganalisis dari hasil karakteristik pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan sehingga didapatkan bentuk kota dan model pertumbuhan kawasan perkotaan.

1.5.4 Tahap Akhir

Tahapan/proses akhir pada penyusunan Tugas Akhir ini berupa ”Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Purworejo”, dengan output yang dihasilkan antara lain:

1. Perkembangan desa-desa perkotaan setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo
2. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan (aspek administratif, fisik spasial, dan kependudukan) setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo
3. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan (aspek administratif, fisik spasial, dan kependudukan) setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo
4. Tipologi kawasan perkotaan dan tipologi pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo.

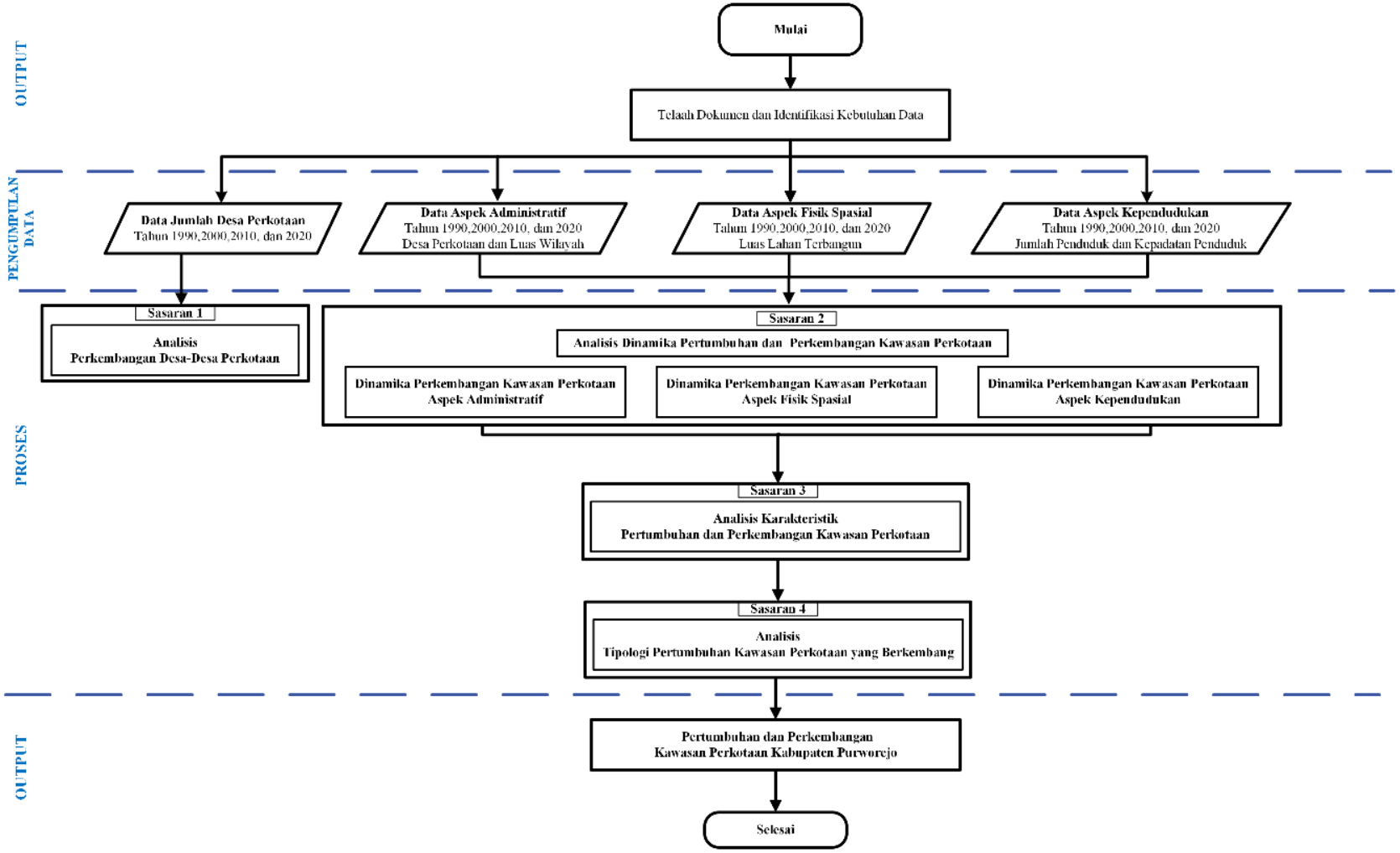

Sumber: Penulis, 2025

Gambar 1. 2. Kerangka Analisis

1.6 Metode dan Hasil Akhir

Metode dan hasil akhir berisi kebutuhan data, instrument pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan pada penyusunan Tugas Akhir "Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Purworejo".

1.6.1 Kebutuhan Data

Penyusunan kebutuhan data merupakan langkah awal yang penting dalam pengumpulan dan analisis informasi. Kebutuhan data dirinci untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki nilai yang maksimal untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan mencapai tujuan. Penyusunan dapat dilakukan dengan bentuk tabel yang bertujuan menyajikan data secara terstruktur. Tabel kebutuhan data sebagai alat bantu untuk mendapatkan data dan informasi dalam proses pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada **Tabel 1.2.**

Tabel 1. 2. Kebutuhan Data

No	Nama Data	Unit Data	Jenis Data	Bentuk Data	Tahun	Teknik Survei	Sumber Data
1	Batas Administrasi Desa	Desa/ kelurahan	Sekunder	Peta	2024	Olah peta	DPUPR Kabupaten Purworejo
2	Batas Administrasi Kecamatan	Desa/ kelurahan	Sekunder	Peta	2024	Olah peta	DPUPR Kabupaten Purworejo
3	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perkotaan	Desa/ kelurahan	Sekunder	Peta	2024	Olah peta	DPUPR Kabupaten Purworejo
4	Jumlah Penduduk	Desa/ kelurahan	Sekunder	Numerik	1990,2000, 2010, dan 2020	Telaah Dokumen	BPS Kecamatan Dalam Angka
5	Kepadatan Penduduk	Desa/ kelurahan	Sekunder	Numerik	1990,2000, 2010, dan 2020	Telaah Dokumen	BPS Kecamatan Dalam Angka
6	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 37 Tahun	Desa/ kelurahan	Sekunder	Numerik	2010	Eksplorasi Web	Badan Pusat Statistik

No	Nama Data	Unit Data	Jenis Data	Bentuk Data	Tahun	Teknik Survei	Sumber Data
	2010 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2010						
7	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2020	Desa/ kelurahan	Sekunder	Numerik	2020	Eksplorasi Web	Badan Pusat Statistik
8	Potensi Desa	Desa/ kelurahan	Sekunder	Deskriptif	1990,2000,	Telaah Dokumen	Badan Pusat Statistik
9	*GHS Built-Up Surface*	Desa/ kelurahan	Sekunder	Peta	1990,2000, dan 2010	Eksplorasi Web	GEE, USGS

Sumber: Penulis, 2025

1.6.1 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan bagian dari proses mengumpulkan data dan informasi dalam suatu penelitian. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan secara sekunder antara lain.

1. Permohonan Data Instansi

   Data sekunder untuk kebutuhan analisis yang tidak dipublikasikan, perlu mengajukan permohonan data ke instansi terkait. Permohonannya diperlukan surat permohonan data yang akan disampaikan kek isntansi pemerintah. Penelitian ini memerlukan data dari Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.

2. Telaah Dokumen

   Telaah dokumen merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang mendalam terhadap berbagai dokumen atau bahan analisis yang relevan dengan topik penelitian. Tugas Akhir ini telaah doumen yang dilakukan yaitu menggunakan dokumen BPS Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Purworejo, junal penelitian, buku terkiat dengan pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan, serta web human-settlement.emergency.copenicus.eu.

1.6.2 Teknik Analisis

Teknik analisis digunakan untuk merinci, menjelaskan, dan menginterpretasi data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian antara lain.

a. Analisis *Time Series*

   Analisis ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dari sebuah kawasan perkotaan dalam jangka waktu tertentu. Analisis ini berupa perkembangan status desa-desa perkotaan dari data Potensi Desa dan Buku Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu juga digunakan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk di kawasan perkotaan pada tahun penelitian (Mardiansjah dkk., 2023a; Subkhi & Mardiansjah, 2019).

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif

   Analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul (Alfatih, 2021). Analisis ini digunakan untuk evaluasi, pengukuran, dan uji hipotesis berdasarkan perhitunagn statistik serta datanya diambil menggunakan metode seperti survei, observasi, dan wawancara (Ummul Aiman dkk., 2022). Data yang dihasilkan dapat berupa grafik, tabel, laporan atau angka yang dapat dinilai. Data kuantitatif yang digunakan berupa jumlah penduduk, kepadatan penduduk, serta luas tutupan lahan.

c. Analisis *GHS Built-Up Surface*

   Analisis ini digunakan untuk mengetahui pertambahan lahan terbangun yang ada di kawasan perkotaan melalui pemrosesan data penginderaan jauh multitemporal selama kurun waktu 40 tahun terakhir dari berbagai jenis citra, seperti *Sentinel 1* dan *Landsat*. Setelah itu dilakukan analisis *SIG* dan menghasilkan *GHS built-up surface* untuk model klasifikasi desa-kota yang mengintegrasikan data area terbangun (Sari & Tambunan, 2022).

1.6.3 Hasil Akhir

Hasil akhir dari proses yang dilakukan penyusun berupa berupa tipologi kawasan perkotaan dan tipologi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Purworejo. Hasil yang diperoleh dari analisis perkembangan desa-desa perkotaan dari tahun 1990, 2000, 2010, dan 2020, analisis dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotan dan analisis karakteristik pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan SK Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro No.107/UN7.5.13/SK/2021 berupa peta tipologi pertumbuhan kawasan perkotaan yang berkembang di setiap kawasan Kabupaten Purworejo yang akan diusulkan agar mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).